

STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI DESA MUARA BARU KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

Luki Oka Prastio

¹ Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. Jl. Bukit Dago Utara
No.25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: lukyoka12@gmail.com , Telp: +6281322292233

Abstrak

Kebutuhan garam sebagai salah satu komoditas strategis ketahanan pangan nasional semakin dirasakan, permasalahan garam di Indonesia dilatar belakangi beberapa faktor penyebab seperti cakupan, aspek produksi, infrastruktur, kelembagaan, pemasaran serta permintaan dan penawaran. Kabupaten Karawang telah memproduksi garam sejak tahun 80 an, mulai dari tahap produksi sampai pada proses pemasaran garam rakyat di Kabupaten Karawang banyak ditemui permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang di lakukan di Dusun Praubosok Desa Muara Baru Kecamatan Cilamya Wetan Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan wawancara dari informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian bahwa Program PUGAR di Kabupaten Karawang sudah berjalan melalui fasilitasi bantuan, pelatihan, pendidikan serta suntikan teknologi dan jaringan, namun masih terdapat banyak permasalahan yaitu tidak adanya perlindungan harga garam dan peran tengkulak yang membuat harga garam tidak stabil dan merugikan para petambak.

Kata kunci: strategi, pemberdayaan, garam, PUGAR

STRATEGY OF EMPOWRMENT PROGRAM OF SALT PEOPLE BUSINESS IN DESA MUARA BARU CILAMAYA WETAN DISTRICT KARAWANG REGENCY

Abstract

The need for salt as one of the strategic commodities of national food security is increasingly being felt, salt problems in Indonesia are motivated by a number of causes such as coverage, aspects of production, infrastructure, institutions, marketing and demand and supply. Karawang Regency has been producing salt since the 1980s, starting from the production stage to the marketing process of salt people in Karawang Regency, many problems were encountered. The purpose of this study was to describe the strategy of the People's Salt Empowerment Program (PUGAR) conducted in Praubosok Hamlet, Muara Village Baru Cilamya Wetan District, Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, with interviews from predetermined informants. The results of the study show that the PUGAR program in Karawang Regency has been carried out through facilitation of assistance, training, education and technology and network injections, but there are still many problems, namely the lack of protection of salt prices and the role of middlemen that make salt prices unstable and detrimental to farmers.

Keywords: strategy, empowerment, salt, PUGAR

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki total luas laut sebesar 3.257.357 Km² dengan garis pantai sepanjang 80.79 Km (Dinas Hidro Oseanografi TNI AL, 2012). Wilayah pesisir pantai menyimpan sumber daya alam potensial untuk dikembangkan yang bernilai ekonomis tinggi untuk dimanfaatkan secara bijak, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut wilayah Indonesia sangat potensial dalam memproduksi garam yang terkonsentrasi di sembilan provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Garam sebagai komoditas pangan strategik yang kebutuhan dan fungsinya terus meningkat setiap tahun baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi. Berdasarkan perhitungan suplai kebutuhan total kebutuhan garam Indonesia adalah 3,8 juta ton, yakni dengan perincian untuk garam konsumsi, pengawetan ikan, dan sebagainya sekitar 1,6 juta ton dan garam industri 2,2 juta ton. Peningkatan produksi garam dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. (Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Kimia Dasar, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi garam adalah faktor cuaca, rendahnya produktivitas dan kualitas garam rakyat disebabkan tidak memadainya teknologi, kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya kemampuan pemasaran dan jalur distribusi yang dikuasai oleh pedagang. Rendahnya kualitas garam tersebut otomatis mengakibatkan rendahnya harga yang diterima petambak garam, kondisi tersebut jelas mempengaruhi kesejahteraan petambak garam (Rindayani, 2013).

Di Provinsi Jawa Barat daerah penghasil garam tersebar di Cirebon, Indramayu, dan Karawang. Cirebon dan Indramayu adalah sebagai sentra penghasil garam, sedangkan Karawang adalah sebagai penyangga produksi garam (Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, 2012).

Kabupaten Karawang pada tahun 2012 ditetapkan sebagai penyangga produksi garam karena memiliki potensi luas lahan garam yang cukup besar apabila dikembangkan secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi dan perbaikan mutu garam lokal, pasalnya Indramayu dan Cirebon belum dapat memenuhi kebutuhan garam di Jawa Barat. Selama ini kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan kekurangan persediaan garam adalah melalui impor. Ketergantungan pada garam impor, khususnya untuk keperluan garam konsumsi tidak mendukung ketahanan nasional.

Permasalahan petambak garam di Kabupaten Karawang terjadi pada tahap produksi seperti, keterbatasan kapasitas permodalan petambak, rusaknya jalan sebagai infrastruktur pendukung, harga jual yang rendah pada saat panen raya, dan lemahnya organisasi kelompok, serta perubahan pola cuaca dan teknologi pendukung. Pada tahap pengolahan permasalahan petambak yaitu rendahnya harga garam, lemahnya posisi tawar petani, serta minimnya bantuan teknis atas kontrol kualitas standarisasi produk. Permasalahan yang muncul pada tahap terakhir yaitu tahap pemasaran berupa persaingan harga

yang ketat dan tidak tersedianya koperasi atau gudang sebagai penampung dan pembeli garam rakyat (Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, 2015).

Kabupaten Karawang sendiri terdapat sebanyak 158 orang petani garam, dengan rata-rata produktivitas garam yang masih rendah sebesar 23.14 Ton/Ha/Tahun. Kualitas garam yang dihasilkan oleh petani garam di Kabupaten Karawang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) karena mutu garam yang memiliki kadar NaCl di bawah 94.00 persen, sedangkan garam konsumsi memerlukan kadar garam NaCl > 94.70 persen (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, 2012).

Menanggulangi masalah tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk meningkatkan produksi garam nasional dengan mendorong petani untuk melaksanakan usaha garam melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Program ini selain bertujuan meningkatkan produksi garam rakyat, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan petani garam. Pada tahun 2011 program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota (Tujuh Kabupaten/Kota sebagai sentra PUGAR dan 33 Kabupaten/Kota sebagai penyangga PUGAR) dengan mengintensifkan potensi lahan garam yang ada (Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, 2012).

Di Kabupaten Karawang khususnya permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan ini adalah tingkat sumber daya manusia (SDM) petambak garam yang masih rendah sehingga melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) petambak garam dibentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dalam

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Dengan adanya kelembagaan tersebut dapat mengurangi kelemahan petambak secara individual dan memudahkan penanganan oleh pemerintah. Pengelompokan masyarakat petambak garam merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas sejatinya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Karsasmita, 1996).

Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perikanan melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat kepada petambak garam di Desa Muara Baru Kecamatan Cilaaya Wetan Kabupaten Karawang.

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, mengenai strategi program berdasarkan *aras mezzo* yang mencakup sasaran, teknik, dan tujuan yang termanifestasi dalam pendekatan pemberdayaan (Edi Suharto, 2014:67) diantaranya: 1. Pemungkinan, 2. Pengatan, 3. Perlindungan, 4. Penyokongan, dan 5. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam

Rakyat. Dengan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini adalah tujuh bulan, penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang dan menjadi titik fokus yaitu semua unsur yang terkait dengan Strategi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, yaitu: Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan Tambak garam di Dusun Praubosok Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Target/Subjek Penelitian

Target/ subjek dalam penelitian ini antara lain: Kepala Seksi Produksi non-ikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Tenaga Pendamping PUGAR Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Ketua Koordinator KUGAR Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dan masyarakat petambak garam Dusun Praubosok.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan cara observasi langsung kelapangan, melakukan wawancara mendalam kepada narasumber guna memperoleh data primer, selanjutnya diperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan strategi dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, serta dokumentasi terhadap proses penelitian.

Teknik Analisis Data

Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan melalui pengumpulan data baik dari lapangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan strategi dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, kemudian melakukan

reduksi data, dan penyajian data terpilih, serta melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi masyarakat pesisir, membuat garam termasuk salah satu sumber mata pencaharian penting yang diandalkan pada musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kabupaten Karawang merupakan daerah yang sangat potensial dalam memproduksi garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional. Petambak garam di Kabupaten Karawang umumnya berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam memproduksi garam masih terbilang sangat tradisional karena letaknya yang jauh dari pusat kota. Berikut merupakan potensi luasan lahan produksi garam yang ada di Kabupaten Karawang pada tahun 2015.

Tabel 1. Potensi Luas Lahan dan Jumlah Produksi Garam Karawang Tahun 2015.

Kecamatan	Kelompok /RTP	Luas Lahan/ Ha	Produksi/ Kg
Tempuran	3 / 30	30	2.270.121
Cilamaya Kulon	1 / 10	10	482.764
Cilamaya Wetan	13 / 128	118	5.270.121
Cilebar	1 / 6	3	-

Berdasar Tabel 1. Kabupaten Karawang sendiri terdapat sebanyak 158 petani garam, dengan rata-rata produktivitas garam yang masih rendah sebesar 23.14Ton/Ha/Tahun.

Potensi lahan produksi seluas 158 Ha dan lahan potensial total sebesar 640 Ha. Potensi luas lahan ini membuktikan jika

produksi garam di Kabupaten Karawang dikelola dengan maksimal akan menambah produktivitas dalam persediaan garam nasional, yang harus dieksplorasi secara maksimal, pasalnya selama ini lokasi garam di Kabupaten Karawang berada di pinggir pantai yang lokasinya terpencil, dengan keterbatasan akses dan kurangnya peminat masyarakat terhadap industri garam karena harganya yang tidak stabil cenderung rendah. Pada situasi normal harga garam di Kabupaten Karawang hanya sebesar Rp. 300–500 /Kg, hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pertumbuhan industri garam di Kabupaten Karawang.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2014 kebutuhan garam nasional mencapai 3,61 juta ton terdiri dari garam konsumsi sebesar 1,48 juta ton dan 2,13 juta ton untuk kebutuhan industri. Dari tahun 2011, kebutuhan garam industri rata-rata mencapai 5,82 persen per tahun. Kebutuhan garam konsumsi rata-rata mencapai 1,40 persen per tahun, sedangkan produksi garam hanya sekitar 2,50 juta ton. Hal tersebut berarti untuk memenuhi kebutuhan garam nasional di bidang industri pada periode tahun 2014, pemerintah paling sedikit harus mengimpor garam sebanyak 1,11 juta ton.

Hampir keseluruhan penduduk Dusun Praubosok Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang adalah pembak garam dan istri mereka bekerja sebagai pengolah terasi dan ikan asin. Ketersediaan lahan potensial namun masih terdapat kendala yang dihadapi para petambak seperti air laut sebagai bahan baku dan saluran irigasi pengairan lahan serta kendala cuaca. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan taraf produksi dan ekonomi usaha garam di Kabupaten Karawang melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR)

oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang telah berjalan walaupun banyak kendala yang dihadapi mulai dari proses produksi, pengolahan, sampai penjualan. Hal tersebut ditinjau berdasarkan strategi aras mezzo melalui Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (EdiSuharto, 2014:67), antara lain:

1. Pemungkinan

Pemungkinan menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini terdapat dua aspek yaitu pemberian bantuan seperti sarana dan prasarana serta bantuan non fisik seperti pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat.

Sebagai langkah awal penerapan program PUGAR pemerintah senantiasa menggali kebutuhan, pada saat itu dimulai dengan pembentukan kelompok, kemudian digulirkan bantuan dana BLM, HDPE atau geomembran, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan guna memenuhi kebutuhan KUGAR memproduksi garam rakyat. Lebih lanjut guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para petambak garam dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas para petambak garam dengan tujuan meningkatkan pendapatan petambak garam sekurang-kurangnya 10% dari tahun sebelumnya. Pemberian bantuan terhadap kelompok kugar berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing.

Tahun 2017 pemungkinan dilakukan dengan melatih masyarakat pesisir utamanya adalah istri petambak garam dengan mengolah garam rakyat menjadi garam herbal dan kecantikan melauai narasumber sekaligus mentor dari Cirebon yang produknya sudah marak terjual dipasaran, dengan ini diharapkan masyarakat akan tumbuh mandiri dengan potensi daerah yang ada.

Upaya pemungkinan dengan memfasilitasi petambak garam yang tergabung dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2012 hingga saat ini dengan tujuan menggali potensi dalam masyarakat dan meningkatkan minat agar produksi garam rakyat semakin berkembang baik kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 2. Kebutuhan Garam Rakyat Di Kabupaten Karawang Tahun 2015.

No	Jenis Industri Rumahan	Kebutuhan per Tahun (Ton)
1.	Pengolahan Ikan Pindang	28.182
2.	Pengolahan Ikan Asin	1.609
3.	Pengolahan Terasi	1.869
4.	Perebusan Rajungan	120
5.	Pembuatan Telur Asin	720
6.	Pengolahan Garam Beryodium	5.400
7.	Pabrik Kecap	240
8.	Sawah	11.520
Jumlah Total Kebutuhan		50.660

Berdasarkan tabel di atas garam rakyat yang digunakan untuk berbagai pengolahan jenis industri rumahan berjumlah 50.660 ton, dan untuk industri rumahan masih kekurangan sebesar 37.606,32 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, 2015).

Garam Rakyat juga diperlukan dalam sektor pertanian, luas lahan pertanian di

Kabupaten Karawang sekitar 19,600 ha yang membutuhkan garam selama dua kali musim tanam sebanyak 784.000 ton/tahun. Sedangkan guna memenuhi kebutuhan garam industri berupa 1. Industri CAP, 2. Industri aneka pangan, 3. Industri Farmasi, 4. Industri tekstil, 5. Industri penyamakan kulit, dan 6. Industri sabun belum dapat diproduksi di dalam negeri, karena kadar garam (NaCl) yang dibutuhkan untuk keperluan industri adalah 97% sedangkan di Kabupaten Karawang baru mencapai 94% (Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, 2015).

Kabupaten Karawang sendiri peruntukan garam baik untuk konsumsi. rata-rata setiap orang mengkonsumsi garam sebanyak 2 gr/hari, jika dikalikan dengan penduduk Kabupaten Karawang berjumlah 2.250.120 jiwa, sehingga dalam waktu satu tahun (356 hari) masyarakat Kabupaten Karawang memerlukan 1.642,59 ton guna keperluan konsumsi, berdasarkan keperluan yang terus meningkat memang diperlukan adanya kesiapan dari petambak.

Pembentukan kelompok merupakan upaya memperkuat ikatan petebak dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan bantuan yang dikelola secara berkelompok diharapkan pembagian bantuan/penggunaan alat secara adil dan merata. Dilihat dari relasi, kerja sama, dan kepercayaan suda terjain dengan baik dalam kelompok, terbukti dengan mengadakan pertemuan dan musyawarah seta adanya tansparansi antar anggota. Namun masih terapat petambak garam dalam kelompok KUGAR yang masih belum sepenuhnya menggunakan HDPE dengan alasan terlalu

rumit dan mahal. Pasalanya diluar bantuan pemerintah petani belum sanggup embeli HDPE secara mandiri.

2. Penguatan

Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang memiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Fungsi penguatan berkaitan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*). Dalam penelitian ini, Dinas Perikanan Kabupaten Karawang melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengalaman masyarakat yang menjadi sasaran program, dengan membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat merupakan beberapa kegiatan yang senantiasa dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang kepada petambak garam melalui fasilitasi oleh pendamping lapangan.

Pendamping lapangan sebagai fasilitator memiliki peran sentral dalam memberikan pelatihan, pengarahan dalam pembuatan garam yang sesuai standar sekaligus melakukan sosialisasi teknologi ulir filter (TUF) dan geomembran, lebih lanjut pemerintah berupaya menanamkan kepercayaan diri para petambak dengan tidak melakukan penen dini khusus di Karawang panen dilakukan dalam 2 hari, yang membuat hasil tidak maksimal karena kristalisasi air

brine tidak merata dan masa garam lebih ringan. Umumnya seperti di Cirebon, panen dilakukan dalam waktu 4 sampai 5 hari yang menghasilkan garam dengan kualitas dan kuantitasnya lebih banyak dan bermasa padat. Tujuan pemerintah melakukan intervensi melalui penguatan salah satunya untuk meningkatkan *value edit* terhadap kualitas *output* penggunaan garam.

Pendidikan yang dilakukan terhadap petani garam salah satunya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Perikanan dan Penyuluhan Tegal (BPPP) dalam pelaksanaan penerapan teknologi pembuatan garam diantaranya Teknologi Ulir Filter (TUF) dan HDPE atau geomembran. Pelatihan dilakukan bukan hanya di tempat atau desa-desa di Kabupaten Karawang, tahun 2015 kemarin diadakan kongres garam di Madura yang diikuti 1 (satu) orang penyuluh atau pendamping PUGAR Kabupaten Karawang dan 2 (dua) orang petan garam.

Pentingnya inovasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama petambak disadari pemerintah dengan mengadakan kongres garam setiap tahun yang akan menumbuh kembangkan pengalaman, wawasan dan diharapkan akan ditularkan kepada para petambak garam di daerahnya masing-masing.

Melalui sosialisasi yang dilakukan berujuan mengembangkan pola pikir petembak tradisional kearah kemajuan. Lebih lanjut peran pendamping lapangan sangat penting dalam memberikan gagasan dan bertukar pengalaman kepada petemba

garam, di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan sendiri pendamping lapangan kerap kali melakukan kontrol baik secara administratif dan lapangan melalui dialog dengan para petambak garam disamping memberikan arahan dalam penyusunan RUB (Rencana Usaha Bersama).

3. Perlindungan

Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Fungsi perlindungan berkaitan dengan interaksi antara Dinas Perikanan dengan lembaga eksternal atau elemen-elemen lain di masyarakat demi kepentingan masyarakat terutama petambak garam dalam memecahkan berbagai masalah.

Tata niaga garam saat ini sangat tidak stabil dan dikuasai mekanisme pasar. Pasalnya pada saat panen raya terjadi harga garam di pasaran turun drastis hingga mencapai Rp 300 - 500 /kg, dan ketika stok garam menipis dan langka seperti tahun ini terjadi tepatnya dibulan Juli harga garam di Kabupaten Karawang meroket mencapai Rp.3000-5000 /kg. Permasalahan ini yang belum dapat selesai oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu belum dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebagai salah satu upaya perlindungan kepada petambak garam.

Kondisi tersebut diakibatkan dari berkembangnya tata niaga garam yang pro liberalistik dengan tidak adanya penetapan

standar kualitas garam, sehingga menyebabkan deviasi atau kesenjangan harga yang tinggi ditingkat produsen petambak garam maupun para pelaku pasar.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh ketua koordinator KUGAR menyebutkan harga garam sangat tidak stabil, dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari harga di lapangan bisa turun sampai Rp 2000 /kg, harga tersebut ditentukan oleh tengkulak yang membeli garam rakyat di Kabupaten Karawang. Jelas terlihat masih maraknya penguasaan kartel perdagangan garam ditingkat lokal menunjukkan bahwa masih lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah yang menyebabkan usaha garam rakyat tidak marketable.

Solusi dari tidak stabilnya harga garam, salah satunya dengan koperasi yang menaungi pembelian garam rakyat. Melalui koperasi pintu tata niaga garam selanjutnya diteruskan ke arena pasar dengan adanya satu pintu ini otomatis harga garam ditentukan oleh koperasi dan mengurangi peran tengkulak dalam tata niaga garam yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan serta kesetabilan harga garam meskipun saat panen raya, namun hingga saat ini belum dapat terwujud karena terbentur permodalan. Posisi tawar petambak garam rakyat sangat rendah dan tidak menguntungkan, kurangnya akses sumber permodalan bagi para petambak sehingga banyak para petambak garam rakyat terjatuh hutang biaya produksi awal pada bakul atau tengkulak.

Sejatinya pembangunan industri garam nasional tidak hanya membutuhkan

pembenahan darisegi teknologi, namun juga tidak kalah pentingnya adalah manajemen atas produksi dan distribusi tata niaga garam tersebut, saat ini pemerintah pusat maupun kabupaten belum dapat memberikan jaminan/perlindungan standar harga eceran tertinggi (HET) garam.

4. Penyokongan

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan mencari serta mengatur sumber dana.

Produksi garam Kabupaten Karawang masih menggunakan cara tradisional, setelah intervensi melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) mulai bergeser kearah peningkatan teknologi pembuatan garam, melalui bantuan HDPE atau geomembran dilakukan aplikasi teknis tata cara penggunaannya. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) wajib mendorong berbagai kegiatan usaha petambak garam (KUGAR) termasuk pengelolaan garam.

Pemberian bimbingan teknis terkait cara pembuatan garam dengan teknologi secara berkelanjutan dilakukan, penguatan kelompok harus dilaksanakan guna

mempertahankan eksistensi KUGAR, dan menjawab tantangan permintaan garam rakyat, dan harus mengarah kepada peningkatan kualitas standar garam industri karena kebutuhan garam industri setiap tahun semakin meningkat, Kabupaten Karawang merupakan salah satu pusat industri di Jawa Barat, beberapa perusahaan yang beroperasi membutuhkan garam industri dalam jumlah besar (Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, 2015).

Tabel 3. Kebutuhan Garam Industri Di Kabupaten Karawang Tahun 2015.

No	Jenis Industri Besar	Kebutuhan per Tahun / Ton
1.	PT. Indofood	5.000
2.	PT. Hans ABC	7.500
3.	PT. Ajinomoto	6.500
4.	PT. Unilever	2.500
Jumlah Kebutuhan		21.500

Berdasarkan tabel kebutuhan garam industri di Kabupaten Karawang bahwasanya garam industri diperlukan sebanyak 21.500 ton/tahun, dengan perkiraan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Penyokongan bukan hanya bersifat fisik, namun lebih dari itu para pendamping lapangan senantiasa memeberikan motivasi kepada KUGAR, perhatian yang diberikan pemerintah daerah diharapkan menumbuhkan semangat, percaya diri, dan kreatifitas serta kemandirian masyarakat pesisir khususnya petambak garam. Guna

meningkatkan kemandirian kelompok dalam menghadapi permasalahan dalam hal ini juga mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping.

5. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Salah satunya pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha dan pengelolaan bantuan dari pemerintah. Hubungan yang terjalin secara tidak langsung dapat menjaga kondisi agar tetap kondusif serta tercapainya upaya kontrol, transparansi antar seluruh elemen baik pemerintah, ketua KUGAR, anggota KUGAR agar terciptanya keselarasan dalam pelaksanaan program PUGAR.

Penedekatan bersifat kekeluargaan kepada petambak, dalam memelihara iklim kesetaraan. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah harus dipergunakan secara berkeadilan, hal ini yang menjadi tujuan pemerintah dalam menjaga hubungan secara kekeluargaan.

Permasalahan muncul ketika bantuan seperti HDPE atau geomembran, mesin pompa atau disel tidak jarang disalahgunakan oleh petambak dengan menjual bantuan yang diterima dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Antisipasinya dengan membuat laporan/pendatan terhadap penggunaan bantuan serta dilakukan pengukuhan kelompok guna memeperkuat dan

meningkatkan kesadaran akan pentingnya bantuan yang telah diterima. Pentingnya intensitas kehadiran jajaran Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan langsung menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kehadiran pendamping lapangan akan meningkatkan kesadaran petambak garam serta meningkatkan semangat dalam memproduksi garam dengan menjamin setiap petambak memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya kontrol pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Prospek perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Karawang memang perlu mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah. Melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat diharapkan akan membawa corak perekonomian masyarakat wilayah pesisir meningkat, seiring kebutuhan garam rakyat yang semakin meningkat, baik kualitas, kuantitas dan fungsinya.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang sudah berjalan saat ini berdasarkan dimensi pemberdayaan sudah dapat dikatakan baik, dengan terbentuknya kelompok, pelatihan yang konsisten, dan suntukan teknologi yang terus dilakukan pemerintah. Hal krusial yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah perlindungan terhadap harga garam yang kian rendah jika panen raya tiba, pemerintah belum dapat berbuat banyak mengenai penetapan harga eceran tertinggi (Het) yang pada hakikatnya sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan koperasi dalam menaungi tata niaga garam rakyat memang sangat diperlukan, besarnya peranan tengkulak dalam menentukan harga membuat petambak garam merugi setiap tahunnya.

Saran

Agar perlindungan dapat dilakukan seharusnya pemerintah segera membentuk koperasi garam yang dapat menampung dan membeli serta memfasilitasi petambak mulai dari produksi hingga pasca panen dan menentukan harga eceran tertinggi (HET). Lebih lanjut 6. Agar terjadi peningkatan produktifitas garam dan meningkatkan efisiensi serta mengurangi permasalahan terutama bahan baku yaitu air laut serta saluran irigasi, perlu secepatnya diterapkan manajemen bersifat korporasi, dengan cara mengolah garam secara bersama-sama, mulai dari irigasi, meja hablur, ulir filter bersama, hingga tercipta peningkatan produktifitas dan mengurangi permasalahan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwas, Oos M. 2014. *Pembberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Posdakarya.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan*

Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

- Sumodoningrat, Gunawan., *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1966.
- Trisnamurti, Anny Sulaswatty,dkk 2008. *Riset dan Indussti Garam di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press, 2008.
- Wardhani, S., & et.al. (2016). *Riset Pengelolaan dan Pengembangan Industri Garam Di Kepulauan Nusantara*. Visi Teliti Saksama. Jakarta: Visi Teliti Saksama.

Jurnal dan Makalah:

- Kurniawan, B. A., Suryono, A., & Saleh, C. (2014). *Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wira Usaha Garam Rakyat*. Wacana, 17(3).
- Haidawati. 2010. Jurnal. "Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat KabupatenJenopo.
- Rindayani. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pamekasan*. (jurnal Vol 1, No 2).

Dokumen

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Propritas Pembangunan Nasional tahun 2011.
- Laporan tahunan potensi luas lahan, produksi dan produktivitas garam provinsi Jawa Barat tahun 2015
- Laporan tahunan potensi luas lahan produksi garam Kabupaten Karawang tahun 2015 yang di berikan oleh informan di tambak

- garam Dusun Praubosok Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
- Laporan Kebijakan Kementerian Perindustrian Dalam Peningkatan Kualitas Garam Rakyat Untuk Memenuhi Kebutuhan Garam Industri. Direktorat Industri Kimia Dasar Surabaya, 29 April 2015.
- Laporan Kunjungan Kerja ProgranPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) 2015. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
- Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2015. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Profil Dinas Perikanan Kabupaten Karawang tahun 2017.
- Internet:**
- Harian Ekonomi Neraca.(2012, Juli 12). Industri. Retrived from Neraca.co.id:<https://www.neraca.co.id/article/16323/kkp-pacu-produksi-garam-lewat-pugar> (diakses pada Minggu, 1 Oktober 2017, pukul 02:25 WIB).
- Wahono, B.M. (2017, Juli 13). <https://beritagar.id/artikel/berita/garam-langka-garam-naik-harga> (diakses pada Minggu, 1 Oktober 2017, pukul 02:55 WIB).